

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ASLI PAPUA MELALUI INDUSTRI KECIL  
MENENGAH DI DISTRIK NABIRE OLEH DINAS PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA**

Philipus Pasang  
NPP. 29.1810

*Asdaf Kabupeten Nabire, Provinsi Papua  
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat  
Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: [philipuspasang03@gmail.com](mailto:philipuspasang03@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Regarding the problems that occur in Nabire Regency where this problem is also a problem that occurs in Indonesia, namely regarding the high poverty rate and also unemployment which is still a lot in Nabire Regency. **Purpose:** The purpose of this study itself is to determine and analyze the role of the Industry Office in community empowerment in Nabire District, To find out and analyze community involvement to participate in activities carried out by the Industry Office in Nabire District, To identify and identify factors inhibiting the role of the Industry Office in implementing community empowerment. Papuan natives in Nabire District. **Method:** The theory used in this material is the theory of community empowerment, according to Mardikanto Mardikanto gives the opinion that the existence of institutional development is very important, because everything will be interconnected with one another. Community Development, Human Development and Business Development will not work as they should if they are not supported by various institutional effectiveness as needed and vice versa, Institutional Development will not run if there is no Community Development, Human Development. The research method used is qualitative research with descriptive and inductive approaches, data collection techniques used are interviews, observation and documentation. **Result:** The theory used in this material is the theory of community empowerment, according to Mardikanto Mardikanto gives the opinion that the existence of institutional development is very important, because everything will be interconnected with one another. Community Development, Human Development and Business Development will not work as they should if they are not supported by various institutional effectiveness as needed and vice versa, Institutional Development will not run if there is no Community Development, Human Development. The research method used is qualitative research with descriptive and inductive approaches, data collection techniques used are interviews, observation and documentation. **Conclusion/Sugegestion:** Community involvement in community empowerment in Nabire District it's still not optimal, where is the community itself when it's saturated with what they do will leave their work, In addition, the community

also lacks the entrepreneurial spirit which they are more into the world of politics, I hope this becomes future challenges for the Department of Industry to be even more carry out socialization about the importance of the entrepreneurial spirit so that people can be involved in business and industry in the future.

**Keywords:** *Role, Community Empowerment, Department of Industry, IKM Up*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Nabire dimana permasalahan ini juga menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu mengenai angka kemiskinan yang tinggi dan juga pengangguran yang masih banyak di Kabupaten Nabire. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Nabire. Untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian di Distrik Nabire, Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat peran Dinas Perindustrian dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat asli Papua di Distrik Nabire. **Metode:** Teori yang digunakan dalam materi ini adalah teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto Mardikanto memberikan pendapat bahwa keberadaan Bina kelembagaan sangat penting, karena semuanya akan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Bina Lingkungan, Bina Manusia dan Bina usaha tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak didukung oleh berbagai efektivitas kelembagaan sesuai dengan yang dibutuhkan begitu pula sebaliknya, Bina Kelembagaan tidak akan berjalan apabila Bina lingkungan, Bina Manusia tidak ada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian telah menyadari arti penting dari sebuah pemberdayaan dan perlunya potensi-potensi yang dimiliki para pelaku usaha khususnya di Distrik Nabire, hal tersebut demikian disampaikan bahwa tujuan dari adanya pemberdayaan ini adalah untuk menimbulkan potensi bagi para pelaku industri kecil menengah dalam meningkatkan kreativitas serta agar masyarakat mempunyai jiwa pengusaha. **Kesimpulan dan Saran:** Keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Nabire masih belum maksimal dimana masyarakat sendiri ketika sudah jenuh dengan apa yang mereka kerjakan akan meninggalkan pekerjaan mereka, selain itu masyarakat juga kurang mempunyai jiwa pengusaha yang dimana mereka lebih banyak turun ke dunia politik, kiranya hal ini menjadi tantangan kedepan bagi Dinas Perindustrian agar lebih banyak lagi melakukan sosialisasi mengenai pentingnya jiwa pengusaha agar masyarakat dapat berkecimpung di dunia usaha dan industri kedepannya.

**Kata Kunci:** *Peranan, Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian, IKM Maju*

## I. PENDAHULUAN

## **1.1. Latar Belakang**

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Dengan adanya Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dilaksanakan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu penyelenggaraan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat dituntut agar lebih mengembangkan kreasi setelah mendapat berbagai pelatihan dan pengajaran untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam berwirausaha dan dapat meningkatkan taraf hidup serta mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat suatu daerah dengan adanya program pelatihan dan pendanaan yang memadai maka dapat dipastikan program pemerintah dapat berjalan dengan lancar, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi melainkan keaktifan masyarakat serta kemauan untuk membangun suatu daerah dalam hal ini membantu pemerintah menjalan tugas untuk mengembangkan UMKM didaerah tersebut. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan agar masyarakat lebih mandiri untuk berkreasi dan aktif untuk bekerja agar mempunyai penghasilan yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari. Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata empowerment mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah pengentasan kemiskinan poverty alleviation sejak digulirkannya program inpres no. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai inpres desa tertinggal. sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan-kemiskinan merupaka „saudara kembar yang selalu menjadi topic kata kuncidari upaya pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program

pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonom masyarakat, teknologi, dan pendidikan untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan, nampaknya sudah menjadi gejala umum diseluruh dunia. Karena itulah, pemberantasan kemiskinan dimasukkan dalam agenda pertama dari 8 agenda Millenium DeveLopment Goas (MDG" s) 1990-2015. Bagi Indonesia upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di Negara kita bukan 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut extreme poverty tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup dibawah garis kemiskinan karena itu, mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat „,“people centered, participatory, empowering, and suistanable (chambers, 1995), maka supaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan besar yang banyak ditemui di setiap negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan untuk menghasilkan sesuatu untuk dijadikan nilai jual, serta kurangnya peran pemerintah membuat kemiskinan sulit untuk diberantas. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekesarasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak maslaah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara, agar tidak terjadi ketimpangan dalam bidang ekonomi. ebih baik dalam sebuah negara. Untuk memperbaiki perekonomian di suatu negara maka hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan sumber daya alam yang tersedia untuk dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, Jika kompetensi sumber daya manusianya baik, maka proses pembangunan akan semakin cepat terlaksana. Dengan begitu pembangunan ekonomi akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar jumlah penduduk miskin tidak semakin bertambah.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Pada saat ini pemerintah daerah mempunyai tugas yang penting untuk melakukan pembangunan daerah salah satu caranya adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat salah satu caranya dilakukan dengan pelatihan dan pembinaan guna mengentaskan angka kemiskinan di daerah, di Kabupaten Nabire sendiri pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian telah melakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan kreativitas masyarakat di Kabupaten Nabire,

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama dari Wuled Novi Prastowo (Fakultas ilmu social dan ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara, 2010). Judul Penelitian Penelitian ini merupakan skripsi dengan judul : “Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan pengrajin keripik tempe di Ngawi.”. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yang digunakan ini adalah analisis deskriptif yang termasuk pada penelitian kualitatif. Hasil penelitian Kesimpulan daripada penelitian ini bahwa pelaksanaan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi di dalam pengembangan usaha kecil yang ada di Desa Prandon Kabupaten Ngawi dengan diberikannya berbagai macam pelatihan – pelatihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha. Penelitian yang kedua dari Aris Setiabudi (Fakultas Dakwah dan ilmu komunikasi program studi pengembangan masyarakat islam,2019). Penelitian ini merupakan skripsi dengan judul: “Peran Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan masyarakat melalui home industry erry art di Dusun Sidoharjo Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan makna pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peran Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penguatan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu pelatihan, pembinaan dan pendampingan. Penelitian yang ketiga dari Ida Rizkiany Nur (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan). Judul penelitian dengannya adalah “Peran Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM sentra industry konveksi di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif tetap sebagai pendekatan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah yang terwakili oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus dalam melakukan pemberdayaan sudah berhasil namun belum maksimal, ini dapat dilihat masih adanya faktor pendukung seperti tenaga kerja yang cukup banyak dan dukungan dari pihak-pihak terkait, namun ada juga faktor yang menghambat yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses pemasaran dan terbatasnya permodalan.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua Melalui Industri Kecil Menengah Di Distrik Nabire Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

## **II. METODE**

Penelitian berguna sebagai pedoman berlangsungnya suatu kegiatan penelitian yang akurat sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan pendekatan penelitian menjadi tahapan yang sangat penting bagi seorang peneliti yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan penelitian. Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data yang akan diteliti melalui pengamatan gejala yang timbul dari suatu kejadian setiap kalinya. Penelitian berguna sebagai pedoman berlangsungnya suatu kegiatan penelitian yang akurat sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan pendekatan penelitian menjadi tahapan yang sangat penting bagi seorang peneliti yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan penelitian. Pendekatan penelitian ada beberapa jenis, yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, campuran dan advokasi. Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan tertentu, secara umum penelitian memiliki tiga macam tujuan yaitu penemuan, pembuktian dan pengembangan. Manusia meneliti untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang nantinya akan dibuktikan apakah solusi itu berhasil, dan selanjutnya akan dikembangkan untuk menjadi pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif pada dasarnya diawali dengan gagasan pemikiran yang dinyatakan menggunakan pertanyaan penelitian (research questions), seperti apa (what), mengapa (why), bagaimana (how), siapa (who), kapan (when) dan sebagainya. Pertanyaan penelitian tersebut yang kemudian akan menjadi penentuan metode pengumpulan data dan bagaimana cara menganalisisnya. Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya (Srivastava, A. & Thomson, S.B., 2009). Menurut Fernandes Simangunsong, data yang diperoleh dalam sebuah penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata hasil dari wawancara yang didukung dengan catatan dari hasil lapangan, dokumentasi, rekaman, dan pendukung lainnya. Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif diartikan sebagai berikut. Metode penelitian yang berpedoman pada filsafat post positivisme, yang digunakan pada penelitian yang kondisi objeknya alamiah, (bentuk dari sinonimnya adalah eksperimen) peneliti diibaratkan kunci dari instrumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian dari kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tujuan dari metode kualitatif adalah untuk menggambarkan realita yang ada di lapangan, meneliti fenomena secara mendalam yang nantinya akan dibahas secara rinci dan tuntas.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis telah melaksanakan penelitian di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire juga beberapa masyarakat sekitar mengenai UMKM dan IKM di Kabupaten Nabire khususnya di Distrik Nabire dan telah mendapatkan beberapa hasil dari penelitian dan wawancara dari beberapa petugas di Dinas Perindustrian sekitar UMKM Kabupaten Nabire dan kemudian akan membahasnya. Beberapa informan yang penulis wawancarai adalah Kepala Dinas Perindustrian, Bapak Sekretaris Dinas Perindustrian, Kepala Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Kepala Distrik Nabire, Pelaku industri.

#### **3.1 Peranan Dinas Perindustrian Dalam Pemberdayaan masyarakat asli Papua di**

## **Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua.**

Pemberdayaan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan industri, karena salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah industri, dalam hal ini industri merupakan unit usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang nantinya dapat dinikmati dan dapat digunakan oleh konsumen yang tertarik dengan produk yang dihasilkan oleh industri ini. Pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menekan angka kemiskinan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan agar menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri dan menjadi kekuatan tersendiri bagi masyarakat guna mempertahankan kehidupannya, serta dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di Distrik Nabire. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Distrik Nabire, penulis menggunakan teori Mardikanto yang digunakan untuk mengukur bagaimana peranan Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan masyarakat asli Papua di Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Teori Mardikanto(2013:113) tentang pemberdayaan ini meliputi 4 Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.

### **1. Bina Manusia**

Masyarakat menyambut baik adanya program pemerintah yang dilakukan untuk menunjang kehidupan masyarakat di Distrik Nabire terlebih para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah). Peran masyarakat dalam pemberdayaan ini membuat kinerja Dinas Perindustrian menjadi lebih optimal karena dalam bekerja dibutuhkan adanya koordinasi yang baik bukan hanya antara atasan dan bawahan namun bersifat menyeluruh sehingga target suatu perencanaan dalam kegiatan terlebih program yang dibuat oleh Dinas Perindustrian ini dapat berjalan dengan baik. Merupakan pengupayaan melalui pemberdayaan masyarakat, yang mencakup peningkatan terhadap beberapa aspek seperti pengetahuan teknis, aksesibilitas modal, manajemen, jiwa kewirausahaan dan advokasi kebijakan dengan berdasarkan pengembangan ekonomi rakyat. Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini, dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Adanya Peran daripada Dinas Perindustrian ini sangatlah membantu masyarakat agar masyarakat terutama pelaku usaha IKM yang berada di Distrik Nabire mempunyai kemampuan untuk menaikkan pendapatan pelaku IKM dengan adanya pelatihan dan juga pembinaan yang berkelanjutan. Indikator bina manusia dalam penelitian ini mengikuti mengikuti teori Mardikanto yaitu pengembangan kapasitas individu. Dari penjelasan diatas dapat kita sandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Hadi (2009) bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya..

### **2. Bina Usaha**

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Bina usaha yang dilakukan oleh pemerintah disertakan partisipatif aktif masyarakat untuk menunjang sarana prasarana yang menunjang peningkatan usaha masyarakat dalam lingkungan yang sudah terbina. Dalam melakukan bina usaha kepada masyarakat pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian sangat serius karena bukan hanya soal pemberian ilmu dengan adanya pelatihan namun juga memodali masyarakat agar mampu bersaing dalam dunia Industri. Pernyataan diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan poerwoko (2012:111-112) dalam Hamid(2018) bahwasanya tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, salah satunya yaitu perbaikan usaha(better business) yang artinya, perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan. Dan juga perbaikan pendapatan (better income) yang artinya, perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan kelurgadan masyarakatnya. Bina usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian pada Distrik Nabire adalah dengan adanya melakukan 3 kegiatan yaitu pelatihan pembuatan tas dari kulit kayu, pelatihan pembuatan produk kemasan, pelatihan mie berbahan dasar sagu . Selanjutnya, menurut hasil pengamatan di lapangan penulis menyimpulkan bina usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire dengan memberikan sosialisasi serta pelatihan melalui program-program yang telah ditetapkan. Bantuan sarana prasarana yang diberikan oleh dinas terkait merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di Distrik Nabire khususnya para pelaku usaha IKM, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi.

### **3. Bina Lingkungan**

Bina lingkungan berkaitan juga dengan pembangunan berkelanjutan (suistanable development), dalam mewujudkan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat, menjadi tanggung jawab bagi seluruh pelaksana dalam memperhatikan adanya akibat yang ditimbulkan bagi lingkungan selama proses perbaikan sedang berlangsung. Karena lingkungan akan sangat mempengaruhi keberlanjutan bisnis maupun kehidupan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis melihat bahwa bina lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian adalah mereka melakukan penanaman beberapa pohon dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang di tanam disekitaran halaman samping Dinas Perindustrian. Dalam hal bina lingkungan Dinas Perindustrian tidak semata hanya ingin masyarakat mempunyai kemampuan dalam hal melakukan kegiatan yang berbau industri tetapi bagaimana masyarakat dapat melakukan kegiatan yang bersifat membangun untuk kedepan agar keberlanjutan atau kontinuitas dari pada program mereka dapat berlanjut hingga ke generasi berikut dengan menjaga kelestarian lingkungan.

### **4. Bina Kelembagaan**



Bina kelembagaan tidak cukup hanya dengan memperhatikan bentuknya suatu lembaga, tetapi juga harus memastikan bagaimana lembaga tersebut dapat berfungsi secara efektif, karena adanya suatu lembaga akan mempengaruhi keberhasilan dari bina usaha, bina manusia dan bina lingkungan. Bina kelembagaan merupakan dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. Kelembagaan yang berjalan dengan baik maka akan mendukung lingkup lainnya yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat yang merupakan menguatkan peran masyarakat dalam mewujudkan program pemberdayaan yang dapat mensejahterakan masyarakat menumbuhkan peran masyarakat agar dapat memberikan kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau ketidakberdayaan masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Masyarakat sebagai subjek pemberdayaan merupakan kunci keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan yakni peran masyarakat serta pemerintah Distrik serta seluruh stakeholder dalam hal ini yang memiliki tujuan yang sama yakni kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan. Pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Distrik Nabire juga harus didukung oleh unsur kelembagaan yang lengkap terdiri dari: Pemerintah Distrik, Dan terlebih Dinas Terkait dalam melakukan pemberdayaan yang dimaksud disini adalah Dinas Perindustrian. Berbagai kerjasama telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam hal ini Dinas Perindustrian yaitu dalam hal pemasaran hasil industri, yang paling penting disini bahwa keaktifan masyarakat yang harus diutamakan karena pemberdayaan harus bersifat dinamis atau bergerak terus-menerus guna membuat masyarakat menjadi lebih aktif dalam segala kegiatan baik itu dalam hal pelatihan maupun pembinaan. Berdasarkan pernyataan diatas maka teori yang sesuai dengan bina kelembagaan menurut penulis yaitu yang dikemukakan oleh Effendi(2008:58) dalam (Bahri, 2013) tentang prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu prinsip partisipasi bahwasanya kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaannya harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri mulai tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil.

### **3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat.**

#### **1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua Distrik Nabire**

Faktor pendukung adanya program pemberdayaan masyarakat melalui para pelaku usaha IKM yang berada di Kabupaten Nabire terutama di Distrik Nabire begitu penting karena mampu mempengaruhi kinerja dalam organisasi Dinas terkait untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut.

##### **a. Dukungan Pemerintah Setempat**

Peran pemerintah dalam mendukung adanya industri yang berada di suatu daerah sangatlah dibutuhkan bagi warga atau masyarakat yang berada disuatu daerah tersebut. Jika pemerintah setempat dapat mengarungi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dalam hal ini adalah para pelaku usaha IKM,

maka itu akan menjadi awal yang baik dan dan kedepan masyarakat akan menjadi sejahtera. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dalam melaksanakan program pemberdayaan yang dilakukan mendukung penuh program tersebut guna membuat masyarakat menjadi mandiri dengan mengajarkan hingga pada terutama pada tahap pemasaran.

**b. Koordinasi dan Kerjasama Dengan Pihak Lain**

Salah satu dasar untuk mengukur keberhasilan sebuah kerja sama daerah adalah dengan adanya dukungan dalam bentuk kinerja yang baik dari pihak yang juga ikut bekerja sama. Yang dimaksud kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan adanya kinerja dan kerja sama yang baik itu akan menandakan adanya upaya dalam mencapai tujuan dan hasil yang baik. Keberhasilan itu sendiri adalah hasil dari sebuah kerja sama yang dapat diukur melalui kinerja dari kerja sama itu sendiri. Terkait koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini dijelaskan langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire pada tanggal 5 Januari 2022 mengatakan “Lalu kami juga bekerja sama dengan kementerian BUMN dalam hal ini PLN yang kami lakukan adalah kami membuat rumah kreatif, dan hasil dari pada binaan kita itu mereka pasarkan secara online”. Benar adanya homeindustry yang beralamat di Jalan Pemuda di Distrik Nabire ini telah beroperasi dan penjualan daripada hasil kerajinan tidak hanya dilakukan secara langsung tapi juga dengan melakukan penjualan dengan media social(instagram).

**2. Faktor Penghambat Peran Dinas Perindustrian Dalam Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua Distrik Nabire.**

Faktor penghambat merupakan faktor yang harus dianalisis karena hal ini merupakan faktor yang menyebabkan terhambatnya bahkan menghalangi proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini. faktor penghambat utama yang terdapat di Kabupaten Nabire adalah yaitu masyarakat itu sendiri yang hanya bergantung kepada pemerintah sehingga apabila belum adanya bantuan maka mereka tidak akan menjalankan kegiatan industri itu sendiri. Adapun faktor penghambat lainnya yang menghambat kegiatan pemberdayaan itu sendiri adalah:

**a. Sarana dan Prasarana Sarana**

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan pelaku usaha industri kecil dan menengah di Distrik Nabire. Namun ketersediaan bantuan dalam sarana dan prasarana ini masih bisa dibilang belum memadai. Sarana yang dimaksud berupa alat yang dipakai dalam bekerja seperti alat jahit yang digunakan dalam pembuatan tas kulit kayu, sedangkan prasarana yang dimaksud disini adalah tempat atau ruangan yang digunakan dalam pembuatan hasil IKM karena terdapat beberapa tempat IKM atau yang sering disebut Home Industry contohnya Home Industry noken

yang tempatnya sudah tua dan kemungkinan dari fisik tidak bertahan lama lagi. Pengadaa sarana dan prasarana berupa barang dan tempat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian sudah baik, namun kendalanya yang terjadi adalah banyaknya permintaan barang dari masyarakat tetapi masyarakat sendiri kurang berkomitmen dalam pekerjaan mereka.

**b. Kemampuan Masyarakat Dalam Menguasai Teknologi**

Terkait dengan penguasaan teknologi dalam industri kecil dan menengah, salah satu faktor penting dari ini adalah sumber daya manusia. Pesatnya perkembangan teknologi di zaman sekarang mengubah paradigma masyarakat yang dulunya menggunakan alat yang begitu tradisional kini dituntut untuk menggunakan teknologi karena perkembangan zaman. Pentingnya masyarakat memiliki kemampuan dalam teknologi terutama dalam hal pemasaran sangatlah penting agar kiranya masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi jual beli bahan dan penjualan barang jadi.

**3.3. Upaya Dalam Menghadapi Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua di Distrik Nabire.**

**1. Upaya Langsung**

Upaya langsung merupakan suatu upaya yang ditujukan langsung untuk perbaikan suatu permasalahan yang terjadi pada suatu organisasi. Upaya langsung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian ini terjadi apabila adanya faktor-faktor yang menghambat.

**a. Penambahan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana adalah hal yang penting dalam upaya pengembangan pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Nabire. Dengan adanya hambatan terkait terbatasnya sarana dan prasarana dalam pemberdayaan pelaku usaha industri kecil dan menengah Kabupaten Nabire maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire memberikan bantuan langsung berupa sarana dan prasarana bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Nabire. Dalam melakukan pelatihan dan pembinaan masyarakat memang diajarkan dari awal bagaimana tentang pemilihan kulit kayu yang baik hingga pada produksi tas.

**b. Melakukan Bimbingan Terkait Pemahaman Industri**

Terbatasnya sumber daya manusia terhadap pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Nabire menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Nabire untuk berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Nabire dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan untuk para pelaku mikro kecil dan menengah di Kabupaten Nabire. Dalam hal menghadapi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat asli papua di distrik nabire adalah dengan melakukan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha industri yang

sekiranya dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi dari pada pelaku usaha industri kecil menengah tersebut agar mereka mempunyai bekal kedepan dalam hal peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat itu sendiri.

## 2. Upaya Tidak Langsung

### a. Penganggaran Dana

Pemerintah Kabupaten Nabire sangat menyadari akan hambatan pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Nabire terkait terkendalanya dalam hal permodalan. Maka dari itu ada penyampaian langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire pada tanggal 5 Januari 2022, yang mengatakan “Dalam hal permodalan sudah ada bantuan anggaran dari perbankan sehingga pelaku usaha IKM di Kabupaten Nabire telah diupayakan sedemikian rupa agar dapat terbantu dalam hal permodalan untuk mengembangkan produk-produk IKM nya.”. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan kepada masyarakat pemerintah kabupaten nabire juga memberikan bantuan dana kepada masyarakat khususnya pelaku usaha IKM agar dapat mengembangkan Industri yang menjadi pekerjaan masyarakat.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemanfaatan teknologi bagi para pelaku usaha industri kecil menengah di Kabupaten Nabire memang masih sangat rendah, oleh karena itu dibuatlah kebijakan akan pemberdayaan sumber daya manusia melalui program kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, terutama dalam pemasaran haruslah ada dibuat akun khusus untuk pemasaran bagi masyarakat kedepan agar masyarakat bisa meleak teknologi kedepannya.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab IV, yang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa :

### 1. Pemberdayaan masyarakat asli papua di distrik Nabire oleh Dinas Perindustrian ini sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari:

#### a. Bina Manusia

Bina manusia yang dilakukan oleh Dinas perindustrian yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait dengan IKM, melakukan pelatihan dan pembinaan terkait dengan IKM.

#### b. Bina Usaha

Binas usaha yang dilakukan oleh Dinas perindustrian adalah dengan melakukan pemberian modal dan juga bantuan berupa sarana prsarana guna menunjang kegiatan masyarakat dalam melakukan kegiatan mereka sebagai pelaku usaha IKM.

**c. Bina Lingkungan**

Bina Lingkungan yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan guna mengatasi kekurangan bahan pembuatan kerajinan dari produk mereka yang dihasilkan didapat dari alam, seperti pembuatan noken yang terbuat dari kulit kayu yang diambil dari pohon yang diambil kulit kayunya.

**d. Bina Kelembagaan**

Bina kelembagaan yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan untuk membantu menjual produk mereka.

**2. Faktor yang menjadi penghambat bagi Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan masyarakat asli Papua di Distrik Nabire:**

- a. Sarana dan Prasarana Sarana
- b. Kemampuan Masyarakat Dalam Menguasai Teknologi
- c. Selain daripada kedua faktor diatas faktor penghambat utama yang terdapat di Kabupaten Nabire adalah yaitu masyarakat itu sendiri yang hanya bergantung kepada pemerintah sehingga apabila belum adanya bantuan maka mereka tidak akan menjalankan kegiatan industri itu sendiri.

**3. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dalam mengatasi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat asli Papua di Distrik Nabire yaitu dengan melakukan:**

**a. Upaya Langsung, berupa :**

- Penambahan sarana dan prasarana  
Penambahan sarana prasarana ini diperuntukan bagi para pelaku usaha agar mereka mampu bekerja dengan optimal dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan.
- Melakukan bimbingan terkait pemahaman industry  
Bimbingan yang dimaksud disini adalah dengan melakukan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha industri yang sekiranya dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi dari pada pelaku usaha industri kecil menengah.

**b. Upaya Tidak Langsung, berupa :**

- Penganggaran Dana  
Adanya penganggaran dana ini diharapkan agar masyarakat mampu mengelola dana yang diberikan dan dapat memfasilitasi masyarakat agar memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kegiatan mereka sehari-hari sebagai pelaku usaha IKM.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk

dijadikan bahan referensi Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua Melalui Industri Kecil Menengah Di Distrik Nabire Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

**Arah Masa Depan Penelitian: (future work):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua Melalui Industri Kecil Menengah Di Distrik Nabire Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Bahri, Efri Syamsul. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkemajuan* (Tim FAM Publishing (ed.); Cetakan I). FAM Publishing.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reserch*. Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Refisi, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2009
- Hamid, Hendrawati. *Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca, 2018.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian